

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah dan penduduk yang besar. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 260.580.739 jiwa dengan luas wilayah 1.904.569 km² serta kepadatan penduduk 137 jiwa per km². Dengan luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar seperti ini, Indonesia tentunya membutuhkan Administrasi Kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah. Administrasi Kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data informasi kependudukan. Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia.¹

Administrasi Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Diantaranya adalah saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, Mengurus Surat-Surat Kendaraan, Mengurus Surat-Surat Tanah, dan lain sebagainya. Permasalahan administrasi kependudukan masih terjadi di Indonesia. Pada tahun 2003 Indonesia menjadi negara yang terburuk administrasi kependudukan di dunia. Hal ini disampaikan Nono Sumarsono dari UNICEF, dalam jumpa pers bersama GTZ (lembaga pemerintah Jerman untuk bantuan teknis), dan konferensi pencatatan sipil di kantor UNICEF

¹ Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Setiap tahun ada 1,5 juta bayi yang lahir di Indonesia tanpa tercatat kelahiran. Masalah nyata yang sering timbul karena pernikahan beda agama atau berbeda kewarganegaraan.²

Untuk mengatur pengelolaan Administrasi Kependudukan di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan Turunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dengan penerapan desentralisasi.³ Perubahan paradigma yang terjadi di Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan diterapkannya otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan atau organisasi penyedia layanan kepada masyarakat setempat.⁴

Penyelenggaraan pelayanan publik pada dasarnya tidak akan terlepas dari sebuah proses pelayanan. Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu fungsi dan tugas utama pemerintah adalah

²TEMPO.Co.administrasi-kependudukan-di-indonesia-terburuk-di indonesia.
<http://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co.amp/27889/administrasi-kependudukan-di-indonesia-terburuk-di-dunia>

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

⁴ jurnal

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui pelayanan prima (*excellent service*) yang diwujudkan jika adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Proses pelayanan menjadi hal sangat penting karena aktivitasnya berhubungan langsung dengan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Baik dan buruknya penyelenggaraan tergantung pada proses pelayanan yang berikan oleh penyedia pelayanan kepada orang yang dilayani yakni masyarakat.

Sumatera Barat merupakan provinsi yang terletak di pulau Sumatera dengan jumlah 19 Kabupaten/Kota di dalamnya. Provinsi Sumatra Barat merupakan provinsi yang terkena dampak gempa yang berskala besar yang mengakibatkan jumlah korban jiwa yang tinggi sehingga perlunya pencatatan ulang oleh pemerintah provinsi agar tertatanya administrasi kependudukan. Salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang terkena dampak gempa adalah kabupaten padang pariaman.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah 17 kecamatan, 103 Nagari dan 593 Korong. Kabupaten Padang Pariaman di jadikan pilloting projek oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan di Indonesia yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Padang Pariaman.

Legalitas keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman. legalitas tersebut dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang

Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁵

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. DUKCAPIL dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

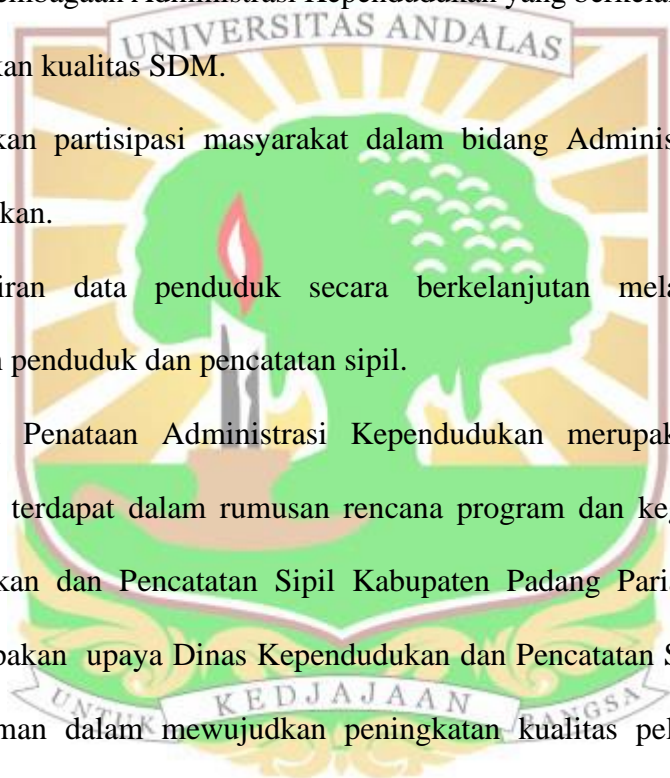
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. DUKCAPIL Padang Pariaman diberikan motivasi untuk melakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. dengan adanya motivasi yang diberikan oleh DIRJEN DUKCAPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan.

⁵ LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan suatu program yang direncanakan dan dibuat oleh Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berfungsi dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cepat, murah dan transparan. Adapun kegunaan Program Penataan Administrasi Kependudukan seperti

- a. Menata kelembagaan Administrasi Kependudukan yang berkelanjutan termasuk meningkatkan kualitas SDM.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Administrasi Informasi Kependudukan.
- c. Pemukhtahiran data penduduk secara berkelanjutan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu program yang terdapat dalam rumusan rencana program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Program tersebut merupakan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan inovasi kegiatan Program Penataan Administrasi Kependudukan terlaksana sejak tahun 2016, 2017, 2018. Perkembangan Inovasi Program Penataan Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada Tabel 1.1.



Tabel 1.1

Perkembangan Kegiatan Dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2016, 2017, 2018

| No | Nama Kegiatan | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|-----|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kegiatan | Capaian (%) | Kegiatan | Capaian (%) | Kegiatan | Capaian (%) |
| 1. | Pelayanan dan pengoperasian SIAK secara terpadu | Terlaksana | 100% | Terlaksana | 92% | Terlaksana | 100% |
| 2. | Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | Terlaksana | 100% | Terlaksana | 92% | Tidak terlaksana | - |
| 3. | Peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan | Terlaksana | 100% | Terlaksana | 92% | Terlaksana | 77% |
| 4. | Pengembangan Database Kependudukan | Terlaksana | 100% | Terlaksana | 92% | Terlaksana | 93% |
| 5. | Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat | Terlaksana | 100% | Terlaksana | 92% | Tidak terlaksana | - |
| 6. | Penyusunan kebijakan kependudukan | Terlaksana | 100% | Terlaksana | 89% | Terlaksana | 83% |
| 7. | Peningkatan kapasitas kelembagaan | Terlaksana | 100% | Terlaksana | 92% | Tidak terlaksana | - |
| 8. | Pelayanan Pedang Saber | Terlaksana | 100% | Terlaksana | 100% | Tidak terlaksana | - |
| 9. | Pelatihan tenaga pengelola SIAK | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 92% | Terlaksana | 75% |
| 10. | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 92% | Terlaksana | 100% |
| 11. | Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Inter-phase tahap awal) NIK | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 85% | Terlaksana | 70% |
| 12. | Penataan arsip kependudukan dan pencatatan sipil | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 100% | Terlaksana | - |
| 13. | Pelatihan dan sosialisasi kebijakan Administrasi Kependudukan | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 92% | Tidak terlaksana | - |
| 14. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DAK pelayanan Administrasi Kependudukan pengaduan masyarakat) | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 92% | Tidak terlaksana | - |
| 15. | Pelayanan keliling Dafduk dan Cakil | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 92% | Tidak terlaksana | - |
| 16. | Pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 92% | Terlaksana | 75% |
| 17. | Pelayanan Administrasi Kependudukan dan cakil | Tidak Terlaksana | - | Tidak terlaksana | - | Terlaksana | 83% |
| 18. | Pelayanan Dafduk dan cakil akhir pekan (Weekend Service) | Tidak Terlaksana | - | Tidak terlaksana | - | Terlaksana | 85% |
| 19. | Launching dan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) | Tidak Terlaksana | - | Tidak terlaksana | - | Terlaksana | 98% |
| 20. | Nagari tertib Administrasi Kependudukan | Tidak Terlaksana | - | Tidak terlaksana | - | Terlaksana | 75% |
| 21. | ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta) | Tidak Terlaksana | - | Tidak terlaksana | - | Terlaksana | 60% |
| 22. | Kadoku KTP-EI | Tidak Terlaksana | - | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 83% |
| 23. | Antar Jemput Administrasi Kependudukan (AJEK) | Tidak Terlaksana | - | Tidak Terlaksana | - | Terlaksana | 100% |

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016, 2017 dan tahun 2018. Hasil Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2016 terlaksana sebanyak 8 kegiatan, di tahun 2017 sebanyak 16 kegiatan dan di tahun 2018 sebanyak 16 kegiatan. Peningkatan kegiatan yang terjadi dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan mengalami perkembangan dari tahun 2016, 2017 dan tahun 2018.

Perkembangan model pelayanan dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan pelayanan mulai perubahan sistem pelayanan hingga dengan berbagai nama dan variasi pelayanan keliling. Dalam pengembangan Program Penataan Administrasi Kependudukan terdapat kegiatan pelayanan keliling yang diberi dengan label dan nama yang unik seperti kegiatan Pedang Saber, KADOKU KTP-Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akte) dan AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan) yang tergabung dalam Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerapkan pelayanan dan pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu. Sistem SIAK bertujuan dalam penginputan data seperti penerbitan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian, Penerbitan Kartu Keluarga (KK), dan KTP di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang targetnya dapat terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Sementara metode yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memunculkan inovasi-inovasi yaitu inovasi Pedang Saber, KADOKU KTP-

Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akte) dan AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan).

Inovasi kegiatan Pedang Saber merupakan inovasi pelayanan yang diperuntukan untuk semua dokumen kependudukan seperti penerbitan KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Pindah Datang, dan Surat Kematian. Pelayanan kegiatan Pedang Saber awal beroperasi di akhir tahun 2016. Kegiatan dilakukan dengan mendatangi langsung nagari sebagai pusat pelayanan. Karena pelayanan bersifat *all in one* yang nantinya tim yang akan turun kelapangan akan dibagi tugas untuk penerimaan berkas administrasi kependudukan.

Dalam pengimplementasian kegiatan Pedang Saber melibatkan petugas nagari yang disebut dengan Register Nagari sebagai *agent of service*. Tugas utama dari Register Nagari yaitu mengumpulkan semua berkas persyaratan akte kelahiran khusus usia 0-18 tahun di nagari tempat dia bertugas, berperan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan keliling dan mendampingi tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pelayanan langsung di Nagari. Untuk menunjang kinerja petugas Register Nagari diberikan honor berupa insentif atas seetiap pelaporan peristiwa kelahiran. Semakin banyak akte kelahiran anak usia 0-18 tahun yang diterbitkan semakin banyak pula insentif yang diterima.

Inovasi kegiatan KADOKU KTP-el merupakan inovasi pelayanan keliling yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini terlaksana pada tahun 2018. Kegiatan Pelayanan KADOKU KTP-el ditujukan untuk siswa/siswi yang akan mendapatkan KTP-elektronik saat yang bersangkutan berulang tahun. Dengan cashing yang di disain

khusus KTP-Elektronik akan dicetak dan dikirimkan oleh DUKCAPIL bekerjasama dengan PT POS Indonesia dan juga diantarkan langsung pada beberapa kesempatan oleh Bupati Padang Pariaman.

Dalam pelayanan kegiatan KADOKU KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan pihak sekolah serta meminta waktu kosong dalam pelaksanaan pelayanan. Kegiatan KADOKU KTP-Elektronik dimulai dengan melakukan perekaman data KTP-Elektronik ke SMA/SMK di Kabupaten Padang Pariaman secara bertahap. Perekaman dilakukan pada anak usia menjelang wajib KTP atau usia 16 tahun keatas. Jika anak tersebut sudah berusia 17 tahun maka akan dicatatakan KTP-Elektronik tepat pada saat ulang tahunnya.

Inovasi Kegiatan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak. KIA awal beropersi Tahun 2018. KIA diperuntukan untuk anak mulai dari usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari. Pelaksanaan inovasi kegiatan Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama pihak sekolah yang ada di-Kabupaten Padang Pariaman agar pelaksanaan berjalan dengan efektif dan efesien

Inovasi kegiatan ALPA BETA (Anak Ahir Pulang Bersama Akta) dan AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependud ukan) merupakan kegiatan penunjang dalam peningkatan Program Penataan Administrasi Kependudukan di- Kabupaten Padang Pariaman. mulai beroperasi pada Tahun 2018. kegiatan ALPA BETA didukung oleh AJEK merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 25 PUSKESMAS dan Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang tujuannya setiap anak yang lahir bisa pulang bersama akta kelahiran. Inovasi kegiatan yang ada dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan berperan penting dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang bertujuan terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Adanya kegiatan peningkatan Administrasi Kependudukan sangatlah bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Hal senada dikatakan oleh salah satu masyarakat yang tinggal di Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman sewaktu wawancara sebagai berikut.

“Program yang dilaksanakan urang capil tu ancah. Baa kok ancah ambo kecekan dikaranoan masyarakaik padang sago indak payah manguruiah surek-surek seperti KTP, KK, dan akte kelahiran anak ambo lai doh. Ambo cukuik mambaok apo yang dimintak urang capil tu katampek yang alah disadioan setelah diambiaknyo syarat ambo tu disuruahnyo ambo nunggu dan dak barapo lamo surek yang ambo buek alah jadi. Biaya yang ambo kaluaanpun bisa bakurang biasonyo kalau ambo mengurus surek kakantua ado lo mangaluaan pitih 50 sampai 100 ribu untuk mengurusnyo waktu habis lo sahari untuak manunggu”⁶

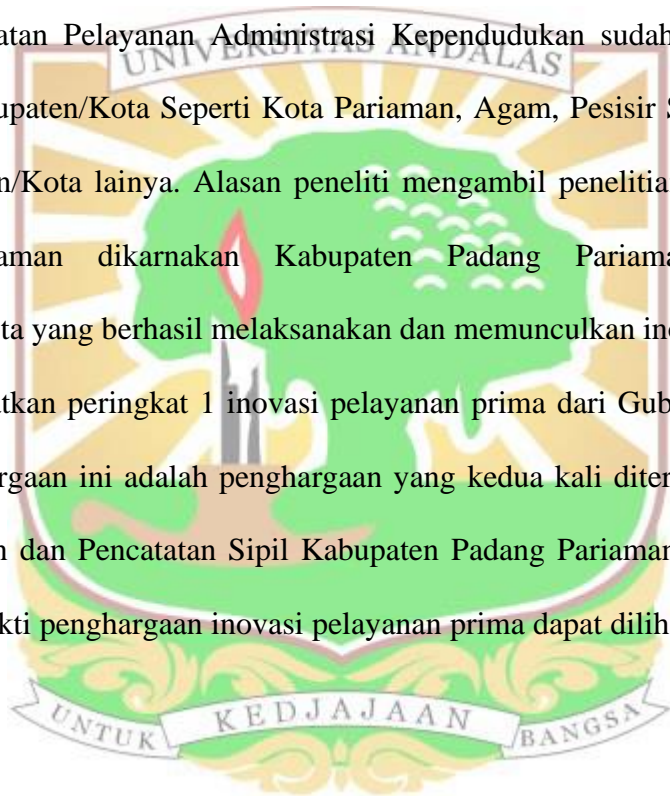
“Program yang dilakukan DUKCAPIL bagus dan efektif karena masyarakat Padang Sago diberikan kemudahan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan seperti pengurusan KTP, KK, dan akte kelahiran. Dengan membawa persyaratan yang diminta oleh DUKCAPIL ke tempat pelayanan dan disuruah menunggu beberapa menit administrasi yang dibuat langsung jadi ditempat. Biaya yang saya keluarkanpun bisa berkurang, biasanya kalau saya mengurus surat-surat ke DUKCAPIL bisa mengeluarkan uang 50 ribu sampai 100 ribu untuk pengurusan, waktu yang dihabiskanpun seharian. (wawancara dengan Masyarakat Padang Sago, Bapak Sudirman pada 29 Agustus 2018)

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sudirman, Masyarakat Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman, 29 Agustus 2018, Pukul 16.05 WIB

Berdasarkan kutipan wawancara, dapat diketahui bahwa kegiatan Peningkatan Administrasi Kependudukan ini sangat membantu masyarakat Padang Pariaman dalam pengurusan surat surat penting. Serta mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sebab jika masyarakat melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang letaknya jauh masyarakat bisa mengeluarkan uang sekitar 50 sampai 100 ribu dalam pengurusan.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sudah dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota Seperti Kota Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Padang dan Kabupaten/Kota lainnya. Alasan peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan Kabupaten Padang Pariaman merupakan Kabupaten/Kota yang berhasil melaksanakan dan memunculkan inovasi pelayanan serta mendapatkan peringkat 1 inovasi pelayanan prima dari Gubernur Sumatera Barat. Penghargaan ini adalah penghargaan yang kedua kali diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam inovasi pelayanan. Bukti penghargaan inovasi pelayanan prima dapat dilihat pada Gambar

1.1



Gambar 1.1
Penghargaan Inovasi Pelayanan Prima DUKCAPIL Kabupaten Padang Pariaman



Dengan adanya inovasi-inovasi program dalam upaya peningkatan pelayanan dokumen kependudukan tingkat persentase dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat kematian dan Akte Perkawinan menjadi meningkat. Peningkatan dokumen kependudukan bisa dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Uraian KTP-el, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian

| Pelayanan dokumen kependudukan | | 2016 | 2017 | % |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|-------|---|
| A | Cakupan penerbitan kartu keluarga | 84,22 | 84,59 | % |
| B | Cakupan Penerbitan KTP | 54,75 | 77,95 | % |
| C | Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran | 55,56 | 71,42 | % |
| D | Cakupan Penerbitan Akte Kematian | 100 | 100 | % |
| E | Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan | 100 | 100 | % |

Sumber :Laporan realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten Padang Pariaman Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa dokumen kependudukan mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2017. Peningkatan terjadi dalam semua penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan seperti perbitan Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Akte Perkawinan. untuk dapat menciptakan kinerja yang baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman diperlukan sebuah manajemen kerja yang baik sehingga kerja yang akan dilakukan akan dapat berjalan teratur dan sesuai dengan yang diinginkan. Usaha yang dilakukan dengan pemanfaatan fungsi manajemen menurut William H. Newman mencakup fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengumpulan Sumber, Pengendalian Kerja dan Pengawasan.

Perencanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, salah satunya Kabupaten Padang Pariaman. Dalam perencanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.2.457.348.220,00 yang berasal dari APBD OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah total anggaran keseluruhan anggaran total OPD sebesar Rp. 4.265.802.703,00.⁷ hal ini disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Sebagai berikut.

“Program Penataan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ini dananya berasal dari APBD Kabupaten Padang Pariaman. pada tahun 2017 Kepala Dinas memberikan kepercayaan kepada seluruh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan pelayanan keliling melalui SK penunjukan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman” (wawancara dengan

⁷ Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Ibuk Zeta Hidayati, S.Sos, pada 20 Desember 2018).

Program Penataan Administrasi Kependudukan ini dilaksanakan oleh seluruh bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui SK penunjukan oleh Kepala Dinas. Penanggung jawab dari program ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sejak tahun 2016, 2017, 2018 dengan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Padang Pariaman. anggaran penataan administrasi kependudukan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan Tahun 2016, 2017 dan 2018

| No | Tahun | Jumlah Anggaran | Total Anggaran Keseluruhan OPD |
|----|-------|----------------------|--------------------------------|
| 1. | 2016 | Rp. 849.920.140,00 | Rp.2.248.846.711,56 |
| 2. | 2017 | Rp. 2.457.348.220,00 | Rp. 4.306.964.605,00 |
| 3. | 2018 | Rp. 2.253.580.962,00 | Rp. 4.007.581.554,00 |

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016, 2017, 2018. Hasil Olahan Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa setiap tahun anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan Mengalami Peningkatan. Peningkatan anggaran tersebut dikarenakan tuntutan pelayanan yang tinggi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Program Penataan Administrasi Kependudukan ini dilaksanakan oleh DUKCAPIL Kabupaten Padang Pariaman dan melibatkan berbagai pihak pendukung kegiatan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Rumah Sakit Umum,

Sekolah, Wali Nagari dan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. pihak yang terlibat memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Perencanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menetapkan tujuan (*Goal*), kebijaksanaan, membuat program serta membuat metode, prosedur dan waktu pelaksanaan kegiatan. Penetapan tujuan (*Goal*) dilakukan dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) . Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata Sistem Administrasi Kependudukan. Kabupaten Padang Pariaman merencanakan pelaksanaan SIAK dengan membentuk operator SIAK di 17 Kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Padang Pariaman agar memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Penataan Administrasi Kependudukan kedepannya.

Metode yang digunakan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan sistem jemput bola yang didukung dengan adanya Pedang Saber, KADOKU KTP-Elektroonik KIA, ALPA BETA dan AJEK. Target pelayanan yang dilakukan adalah daerah pelosok yang masih banyak belum mempunyai dokumen kependudukan sesuai dengan laporan Register Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Namun tampaknya dalam perencanaan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana awalnya yaitu mendahulukan daerah pelosok nagari yang

letaknya jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. hal senanda dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Daftar Penduduk Kabupaten Padang Pariaman.

“Kami melakukan pelayanan jemput bola pertama kali di daerah Lubuak Alung dikarenakan akses dan sinyal yang bagus di daerah tersebut. Untuk target awal kami sebelumnya yaitu daerah pelosok seperti Kampung Dalam, Tandikek dan daerah pelosok lainnya kami usahakan mencari solusi agar pelayanan dilaksanakan di wilayah tersebut sebab di daerah tersebut akses transportasi dan sinyal susah makanya kami melaksanakan pelayanan di daerah yang bisa kami jangkau dulu”. (wawancara dengan Kepala Pelayanan Daftar Penduduk Kabupaten Padang Pariaman, Ibuk Erlinawati, S.Sos, Pada 20 Desember 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara dapat diketahui bahwa dalam proses pelayanan jemput bola baru bisa dilakukan di daerah yang aksesnya mudah dan memiliki sinyal yang bagus. Sedangkan nagari yang berada dipelosok Kabupaten Padang Pariaman yang akses transportasi dan sinyal yang susah belum bisa dijangkau oleh DUKCAPIL padahal daerah yang sangat membutuhkan pelayanan jemput bola adalah daerah pelosok tersebut. untuk tim pelaksana pelayanan seluruh pegawai DUKCAPIL memiliki peran ganda dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan, hal ini membuat proses pelayanan menjadi kurang efektif.

Program yang telah direncanakan tentunya perlu dukungan dari sumber daya manusia dan spesialisasi tugas masing-masing sumber daya manusia tersebut. Dalam hal ini perlu memikirkan pengorganisasian secara rinci dan baik. Organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam

usaha mencapai tujuan.⁸ Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan semua pegawai yang ada di dinas terlibat dan ikut serta dalam pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari bidang dan tim yang ada.

Dalam pelaksanaan program-program DUKCAPIL berlandaskan pada Undang-Undang RI No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. tujuannya agar pelaksanaan kegiatan teratur, Kepala Dinas menempatkan pegawai-pegawainya sesuai bidang dan keahliannya masing-masing seperti tim pengoperasian SIAK sebanyak 13 orang yang ada di setiap Kecamatan, Tim Pedang Saber sebanyak 5 tim, pembentukan 103 register di setiap Nagari agar tercapainya rencana DUKCAPIL dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan ternyata masih mengalami kekurangan sumber daya manusia akibatnya kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik sebab perbandingan beban kerja pegawai dengan masyarakat yang dilayani sangat berbanding jauh yakni dengan Jumlah pegawai yang ada di DUKCAPIL sebanyak 52 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 24 orang dan Non PNS sebanyak 28 orang sementara yang akan dilayani masyarakat sebanyak 408.612 yang tersebar di 17 kecamatan dan 103 Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman hal senada dikatakan oleh Kepala Bidang Daftar Penduduk 17 Oktober 2018.

“Dalam pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kami masih kekurangan 5 operator teknis di 5

⁸ Handyaningrat Soewarno.1986. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen, PT Midas Surya Grafindo, Jakarta. hlm 42

Kecamatan dikarenakan kami kekurangan dana , sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara program yang tergabung dalam SIAK seperti program Pedang Saber dan KADOKU KTP-el tetap kami laksanakan sesuai dengan tujuan DUKCAPIL agar masyarakat bisa terlayani”

Berdasarkan kutipan wawancara dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan khususnya kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdapat kekurangan dana, sarana prasarana serta operator teknis sebanyak 5 operator. Adanya kekurangan tersebut membuat kegiatan peningkatan pelayanan administrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan pelayanan yang kurang efektif di Kabupaten Padang Pariaman.

Perlunya sarana dan prasarana penunjang menentukan sasaran tujuan program. Untuk itu, Pemerintah Padang Pariaman dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat anggaran dalam pelaksanaan program sebesar Rp 2.457.348.220,- yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD.⁹ Adapun rincian dana yang digunakan yaitu kegiatan pelayanan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, pelatihan tenaga SIAK, implementasi SIAK, pembangunan dan penataan sistem koneksi, koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat, pelayanan keliling dan penyusunan kebijakan kependudukan.

⁹ LAKIP Tahun 2017 Kabupaten Padang Pariaman

Proses Manajemen Penataan Administrasi Kependudukan tidak akan terlepas fungsi Pengumpulan Sumber (*assambling resource*) dengan kata lain alat-alat atau unsur-unsur manajemen (*tools of manajemen*) dalam pelaksanaan program. Unsur-unsur yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan seperti *man* (manusia), *money* (modal/uang), *methods* (cara), *material* (bahan-bahan), *machines* (alat-alat) dan market (pasar).¹⁰ Dalam pelaksanaan program penataan Administrasi Kependudukan ternyata masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya kurangnya Sumber daya manusia dalam pengoperasian SIAK, dana, bahan-bahan, mesin dan transportasi pelayanan. Hal ini disampaikan oleh kepala bidang pelayanan daftar penduduk, 29 Agustus 2018 sewaktu wawancara.

“Dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kekurangan dana, sarana prasana lainnya. Seperti dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan keliling kami masih menggunakan komputer dan alat-alat yang terpasang dikantor untuk melakukan pelayanan, setiap kali kami melakukan pelayanan kami selalu memindah-mindahkan alat tersebut dari kantor ke bus. Kamipun belum mempunyai bus pribadi, bus yang kami punya hanya pinjaman dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan pelayanan keliling masih banyak terkendala dana untuk melakukan pelayanan keliling”

Berdasarkan kutipan wawancara, dapat diketahui bahwa Program Penataan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terkendala dari beberapa unsur seperti pendanaan yang kurang, transportasi, komputer serta penunjang pelayanan keliling lainnya. Peneliti berasumsi bahwa

¹⁰ Handyaningrat Soewarno.1992. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT Midas Surya Grafindo, Jakarta. hlm 20-21

dengan kualitas seperti ini akan berdampak tidak efektifnya pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses Manajemen Penataan Administrasi Kependudukan tentu tidak akan terlepas dari pengawasan. Pengawasan yang terjadi dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan melibatkan beberapa pihak seperti Kepala Dinas, Sekretaris dan Inspektorat. Pihak terkait memiliki tugas masing-masing dalam pengawasan baik pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. di dalam pengawasan akan ada pengamatan dalam pelaksanaan program sehingga dapat diketahui kekurangan dari apa yang telah dilaksanakan dan dapat memperbaikinya. Namun peneliti berasumsi bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Daftar Penduduk Ibuk Erlinawati pada tanggal 17 Oktober 2018, mengatakan bahwa

“Pengawasan dilakukan dengan 2 cara, pertama pengawasan langsung. pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas dengan cara ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan keliling, kedua pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan inspektorat melalui laporan-laporan kegiatan yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan. Untuk pengawasan langsung setiap kegiatan hanya dilakukan pas *launching* kegiatan saja oleh Kepala Dinas untuk kegiatan selanjutnya diserahkan pada pelaksana pelayanan. Sementara untuk pengawasan tidak langsung biasanya kami memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada Kepala Dinas dan inspektorat. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan tidak langsung yaitu jaranganya laporan-laporan kegiatan yang diberikan ke Kepala Dinas oleh tim pelaksana. sementara itu kegiatan pelayanan kelilingpun jarang dilakukan kalau tidak ada permintaan pelayanan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas masih terdapat kekurangan yakni masih belum tertibnya pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pelayanan keliling kepada Kepala Dinas.

Kegiatan pelayanan jemput bola dalam Program penataan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terlaksana pada tahun 2016 sampai tahun 2017. di tahun 2018 kegiatan pelayanan jemput bola sudah mulai tidak dilaksanakan lagi dikarenakan minimnya sumber daya manusia serta minimnya dana untuk pelaksanaan pelayanan ke lapangan sehingga kegiatan kembali dilaksanakan di kantor seperti semula.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program tentunya tidak lepas dari suatu proses manajemen. Manajemen yang baik dapat mengantarkan tujuan dan saasaran yang ingin dicapai dari suatu program secara optimal. Untuk mencapai tujuan yang baik dan optimal melibatkan berbagai unsur terkait yang harus diatur pelaksanaan dengan baik agar pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh Mengenai Manajemen Program Penataan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah peneliti adalah Bagaimana Manajemen Program Penataan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Manajemen Program Penataan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dengan adanya penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait Manajemen Program Penataan Administrasi Kependudukan serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Administrasi Publik, khususnya kajian Manajemen Program Penataan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

1.4.2. Manfaat Praktis

Untuk memperkuat teori Manajemen dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya serta mampu memberikan manfaaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan kualitas manajemen sebuah program.

